

RENJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENJA
Tahun Anggaran 2024

DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

JL. KAPT. PIERRE TENDEAN - KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, yang mana Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakan salah satu unsur teknis Penunjang Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Sosial, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat maka diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk Otonomi Daerah dapat mempunyai keleluasan dan kesempatan serta kemandirian dalam menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Renja ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, 6 Desember 2023


PI KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
REFIYENDRI S. Sos. I
Pembina Tk.I
NIP. 19670611 198802 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022 DAN PREDIKSI TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.....	7
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial	9
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	9
2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Sosial Kab.Tanjung Jabung barat	23

3.3	Program dan kegiatan	25
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	30
BAB V	PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepenuhnya akan mendukung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini OPD berpedoman kepada Rencana Strategis.

Dalam pelaksanaannya Renstra OPD dijabarkan ke dalam Renja yang merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja-OPD disusun berpedoman pada RPJMD, dan Renstra OPD dalam hal ini adalah RPJMD tahun (2021-2026) sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih.

Kegiatan-kegiatan pada RenjaOPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra OPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial mengemban tugas dan tanggung jawab Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat teratasi.

RenjaDinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2024, yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RenjaDinas Sosial merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan RenjaOPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunan RenjaOPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RenjaDinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur bidang Sosial yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan yaitu :

1. Memberikan gambaran PMKS yang ada di Tanjung Jabung Barat
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai titik awal dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah untuk memberikan arah rencana Kegiatan untuk satu Tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan bersinergis antara sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah maka tujuan Ranwal Renja ini adalah :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman, alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024.
3. Sebagai paduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika

Sistematika RenjaDinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun sebagai Berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021 DAN PREDIKSI TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022 DAN PREDIKSI TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 berjalan sesuai yang diharapkan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu terhadap Realisasi Renstra SKPD dapat digambarkan pada penjelasan dibawah ini, dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2022 Sebagai Berikut :

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022

	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Keu %	Fisik %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,731,346,042	1,038,912,642	93	93
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113,037,650	104,858,785	92.76	99.38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	113,037,650	104,858,785	92.76	99.38
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,617,823,194	2,417,038,721	92,33	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,518,533,194	2,322,748,721	92,23	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	99,290,000	94,290,000	94,96	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46,647,000	46,601,500	99.90	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	46,647,000	46,601,500	99.90	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466,133,893	439.739.000	94,34	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,878,787	2,878,450	99.99	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,874,106	61,343,550	94.56	95.61
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19,700,000	3,500,000	17.77	17.77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,893,000	32,785,000	88.87	88.82

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,300,000	4,085,000	64.84	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335,488,000	335,147,000	99.9	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,690,000	96.173.299	83,85	83,85
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,290,000	4,270,000	99.53	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,600,000	27,103,299	59.44	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64,800,000	64,800,000	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373,014,305	209.403.646	56,14	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134,649,325	111,541,412	82.84	90.17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,900,000	26,995,000	93.41	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	209,464,980	209,403,646	99.97	100
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	163,482,788	122.574.725	74,98	99
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	16,642,210	16,642,210	100	100
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	16,642,210	16,642,210	100	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	146,840,578	105.932.515	72,14	99
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	72,626,225	70,647,250	97.28	100
	Pemberian Layanan Rujukan	72,439,353	33,510,265	46.26	96.82
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1,775,000	1,775,000	100	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4,018,754,331	3,763,176,974	93,64	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4,018,754,331	3,763,176,974	93,64	100
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	169,994,124	166,148,610	98.06	98.74
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	169,443,610	146,794,124	86.35	99.82
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,679,316,597	3,450,234,240	93.77	99.94
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	120,324,450	113,361,850	94,21	99,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	120,324,450	113,361,850	94,21	99,00
	Penyediaan Makanan	120,324,450	113,361,850	94.21	99.00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	52,839,196	50,589,196	95,74	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52,839,196	50,589,196	95,74	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52,839,196	50,589,196	95.74	100
	TOTAL DANA	8,086,746,807	7,502,054,108	92,77	98,20

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2022 secara keseluruhan sudah mencapai target fisik sebesar 98,20 % dengan daya serap keuangan sebesar Rp.1.670.319.648,- atau 92,77%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal Kesejahteraan Sosial dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti Memberikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pelayanan Psikososial bagi PMKS ditrauma centre termasuk bagi Korban Bencana, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Napak Tilas serta potensi pemanfaatannya secara luas.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki multi permasalahan Sosial yakni adanya 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) serta berbagai macam bencana alam dan Sosial yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan harus segera mendapatkan penanganan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk itu perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari Renja yang telah disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator Kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Sosia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan, telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program dan Kegiatan yang sesuai dengan permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2024 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/ Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Layanan Kedaruratan

10. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

11. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar

12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan

- Penyediaan Sandang

14. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota

- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

15. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel : 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Th. 2018)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9 = (4 +6+8)	10=9/4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,36%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,79%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,26%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksanya kegiatan pelayanan administrasi keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	96,11%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,93%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya alat tulis kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,02%	12 Bulan	36 Bulan	60%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 20	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7= 6/5	8	9 = (4 +6+8)	10=9/3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,30%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,39%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya media cetak/elektronik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya/tersedianya makan dan minum rapat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,95%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Penyediaan Media Cetak/Elektronik	tersedianya media cetak dan elektronik dan iklan layanan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	98,75%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	95,57%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung aula/Kantor	1 Paket	-	-	-	-		-	
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya pengawasann pembangunan gedung kantor	1 Paket	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur	1 Paket	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Terlaksananya perencanaan pengecoran rabat beton halaman kantor	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pengawasan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor	Terlaksananya pengawasan pengecoran rabat beton halaman kantor	1 Paket	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100%	
Pengadaan kendaraan dinas operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional	9 Unit	-	-	-	3 unit	3 Unit	33%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	50 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	110 Unit	73%
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	50	-	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	30 Init	73%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operaional dinas	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	90,01%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	terpeliharanya peralatan geung kantor	100%	-	12 bulan	12 bulan	92,49%	12 bulan	36 bulan	60 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor	100%	-	3 Bulan	3 Bulan	100%	3 Bulan	36 bulan	60 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan Kinerja aparatur	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 bulan	60 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PNS	10 Orang	-						
Pengembangan SDM	Meningkatnya Pengetahuan dan kinerja aparatur	8 Orang	-	6 orang	6 orang	96,38	6 orang	6 orang	25%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	32 Orang	-	6 Orang	6 Orang	96,38	6 Orang	6 orang	25 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem manajemen pelaporan kinerja dan Keuangan	100%	-						
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	25 Dokumen	5	5	5	100%	5	15	60 %
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang menerima bantuan	80%							
Pendataan dan Pelaporan PMKS	Tersedianya data dan Profil PMKS	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	25%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Pendataan fasilitas UEP bagi keluarga miskin	tersedianya data UEP Keluarga Miskin yang berham mendapat bantuan	28 Dokumen	-	7 Kec	7 Kec	77,50	7	7	25%
Penyuluhan Bahaya Narkoba berbasis Sekolah	Pelajar mengetahui Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	100 Siswa		2 Kec	2 Kec	92,70	100 Siswa	100 Siswa	25 %
Pembinaan dan Monitoring Bansos Rastra dan BPNT	Pendistribusian/Penyaluran Bansos Rastra sampai tujuan dan tepat sasaran	52 Kec	-						
Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Bufferstock Barang Bencana	Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	75 Kali Kejadian Bencana			-	99,26		15	40%
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan	Meningkatnya peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat	20.000 KPM		13 Kec	13 Kec	96,48	6090 KPM	6090 KPM	30,45%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	80%	-						
optimalisasi peran dan fungsi Karang taruna	Meningkatnya kemampuan manajemen Karang taruna	13	-	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA)	Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan	
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah Lanjut Usia	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Lansia	65 Kec	-	13 Kec	13 Kec-	83,27%	13 Kec	26 Kec	40%
Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial	Terlaksananya pemantauan bantuan pemberdayaan social	52 Kec	-				-	13 kec	25 %
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Terpeliharanya TMP Yudha Satria dengan baik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	99,57%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun Veteran RI	Meningkatnya kinerja legiium Veteran di Tanjab Barat	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	67,22%	12 Bulan	36 Bulan	60%
Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan	Terlaksananya Kegiatan Upacara Hari Pahlawan	5 Kali Kegiatan	1 kali kegiatan	1 Kali	1 Kali	99,82%	1 Kali	2 Kali	60%
Verifikasi dan validasi data Terpadu Penanganan Fakir Miskin	Terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin	4 Kali Kegiatan	--	1 Kali Kegiatn	1 Kali egiatan	99,98%	-	1 Kali Kegiatan	25%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS	8%	-						

Santunan Pemulangan Tuna Sosial	Terlaksananya santunan, pengobatan dan pemulangan tuna sosial	205 orang	20 org	35 Org	35 Org	70,98	40 Org	40 Org	46 %
Operasi Terpadu Tuna Sosial	Masyarakat pedili dan ikut serta dalam pencegahan dan penanganan tuna susila, gepeng dan anak jalanan	45 Org	-				-	-	
Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma		35%	-						
Pembuatan aksesibilitas bagi difabel/ penyandang cacat	Terbangunnya aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat	100%	-				-	1 Paket	100%

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2025 yaitu :

“ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi, konsultasi, pengawasan dan pelayanan secara umum kepada para pemangku kepentingan;
2. Menciptakan pola pikir aparatur sesuai jabatannya dengan tupoksi dibidangnya;
3. Membentuk aparatur yang berkinerja tinggi sesuai kebutuhan masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan baik secara vertical maupun horizontal.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan sistem administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada satu tahun kedepan dapat tercapai.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan;
6. Terwujudnya tertib administrasi manajemen Asset Daerah;
7. Melaksanakan pemerataan pelayanan disemua kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menyesuaikan program kegiatan
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pemberdayaan Sosial
9. Program Rehabilitasi Sosial
10. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. Program Penanganan Bencana
12. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2024 yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

16. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
18. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan bahan material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan

- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarat, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
14. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program Rehabilitasi Sosial
17. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
18. Program Penanganan Bencana
19. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2022 yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

22. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
24. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan bahan material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
27. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
- Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
- Pemberian Layanan Kedaruratan

4. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Rujukan
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

3. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- Rujukan Anak-Anak Terlantar

4. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PRGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel : 4 terlampir :

Tabel 4
Rencana Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja Program (but.com) dan Kegiatan (but.puf)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025				
							Lokal	Target	Rp		Sumber Dana	Target	Rp		
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
Tertungganya bisa kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Saliq Kabupaten		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Nilai AKIP Perangkat Daerah Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Pencapaian Indikator hasil temuan Inspektorat		09 01 100%				09 02 100%			
			1.06.00	URUSAN PENDIRINTAHAN BIDANG SOSIAL						5.041.966.110					8.830.161.324
			1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TENGGARUA			Persentase Penyediaan Komponen Peningkat Pelayanan Kantor			100%	4.522.705.700			100%	6.475.161.324
			1.06.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja			6 Laporan	62.870.000			6 Laporan	150.000.000
			1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	Dikos	6 Laporan	37.270.000	DAU		6 Laporan	100.000.000
			1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dikos	3 Laporan	26.600.000	DAU		3 Laporan	50.000.000
			1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Tahunan APBD		12 bulan	3.030.626.610			12 bulan	3.140.000.000
			1.06.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dikos	20 orang/ 12 bulan	2.802.408.610	DAU		20 orang/ 12 bulan	3.000.000.000
			1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dikos	1 Dokumen	146.520.000	DAU		1 Dokumen	120.000.000
			1.06.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dikos	12 Laporan	20.700.000	DAU		12 Laporan	20.000.000
			1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tingkat Kehadiran Pegawai			75 Paket	35.800.000			75 Paket	36.000.000
			1.06.01.2.05.02	pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Tersedianya Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dikos	75 Paket	35.800.000	DAU		75 Paket	36.000.000
			1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Cakupan Layanan Administrasi Umum			100%	606.390.600			100%	990.500.000
			1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dikos	10 Paket	9.016.000	DAU		10 Paket	4.000.000
			1.06.01.2.06.02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dikos	10 Paket	65.905.000	DAU		10 Paket	120.000.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dikos	2 Paket	16.350.000	DAU		2 Paket	24.000.000			
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetak dan Pengendalian Pencetakan			Tersedianya Barang Cetak dan Pengendalian Pencetakan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian Pencetakan yang Disediakan	Dikos	4 Paket	45.832.600	DAU		4 Paket	35.000.000			
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dikos	12 Dokumen	6.486.000	DAU		12 Dokumen	7.500.000			
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dikos	200 Laporan	405.716.800	DAU		200 Laporan	800.000.000			

		1.06.01.2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	332.680.000	100%	152.000.000	
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbaiknya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas	12 Laporan	4.040.000	DAU	12 Laporan	2.000.000
		1.06.01.2.06.02	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbaiknya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diadalkan	Dinas	24 Laporan	45.600.000	DAU	24 Laporan	50.000.000
		1.06.01.2.06.04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Terbaiknya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diadalkan	Dinas	8 Laporan	270.240.000	DAU	8 Laporan	100.000.000
		1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD		92 Unit	237.633.950		92 Unit	1.599.661.324
		1.06.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terbaiknya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadalkan	Dinas	17 Unit	60.292.000	DAU	17 Unit	700.000.000
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Terbaiknya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Diadalkan	Dinas	-	26.000.000	DAU	6 unit	100.000.000
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Perabotan dan mesin lainnya	Terbaiknya Mebel	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diadalkan	Dinas	71 unit	159.541.950	DAU	71 unit	799.661.324
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64 Unit	232.361.600		64 Unit	407.000.000
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perbinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terbaiknya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbinaannya	Dinas	17 Unit	188.041.600	DAU	17 Unit	180.000.000
		1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Perabotan dan mesin lainnya	Terbaiknya Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perabotan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas	47 unit	20.180.000	DAU	47 unit	27.000.000
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terbaiknya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas	4 Unit	45.140.000	DAU	4 Unit	200.000.000
		04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		perentase PRRS yang diberi bantuan		58,37%	307.643.300		79,16%	1.100.000.000
		04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penganjang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan, Pengemis di Luar Pant Sosial		jumlah pke yang diberi bantuan		58,37%	264.403.000		79,16%	600.000.000
Terpenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar dan gelandangan dan pengemis	Pemerintah Penduduk Penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, lanjut usia tertantar serta gelandangan dan pengemis di luar pant sosial	04.2.01.01	Penyediaan Pakaian	Terpenuhi Kebutuhan Pemakaian Per Orang sesuai dengan Standar GBI Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakaian sesuai dengan Standar GBI Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kec	100 org	109.750.000	DAU	100 org	200.000.000
			Penyediaan Sandang	Terbaiknya Bekas dan Kelengkapan lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang Terada dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kec	100 orang	97.700.000	DAU	100 orang	200.000.000
		04.2.01.06	Pembelan Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terbaiknya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertantar, Anak Tertantar, Lanjut Usia Tertantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kec	50 orang	26.953.000	DAU	50 orang	200.000.000
		04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Pant Sosial		jumlah PRRS yang dibantu		58,37%	63.240.300		79,16%	500.000.000
		04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Terbaiknya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Kec	120 org	63.240.300	DAU	120 org	500.000.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Bidang Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus diwujudkan. Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan bahwa terwujudnya aparatur yang professional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan aparatur yang belum dituntaskan.

Kuala Tungkal, 6 Desember 2023


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT
DINAS SOSIAL
REFIYENDRI S. Sos. I
Pembina Tk.I
NIP. 19670611 198802 1 003